

dan sebagai sebuah pengandaian, pendapat seperti ini sah saja, walaupun ini juga berisiko mengecilkan filsafat sebagai sebuah pintu menuju kebenaran. Namun, bagaimana jika apa yang dikhawatirkan itu bukan lagi sebuah pengandaian, tetapi telah menjadi kenyataan? Solusi normatif seperti di atas justru dapat menumpulkan kemampuan ilmu pengetahuan untuk menyikapi realitas dan perkembangan. Kembali ke gagasan tentang *verstehen* dan *erklären*, mungkin yang perlu dilakukan adalah mendekati fenomena semacam itu dengan kehendak untuk menerangkan dan memahami daripada melakukan penilaian moral. Inilah tantangan utama ilmu pengetahuan, terlebih-lebih filsafat, dalam berhadapan-hadapan dengan fenomena material atau realitas.

Meskipun demikian, buku *Ideologi Budaya* ini merupakan lahan latihan yang sangat baik bagi pembaca yang ingin berkuat dengan berbagai macam pemikiran yang terkait dengan tafsir dan pemaknaan, dengan hermeneutika dan semiotika. Gagasan-gagasan Irmayanti dapat dipandang sebagai pancingan bagi respons kritis pembaca dan, dengan demikian, buku yang ditulisnya ini dapat menjadi sarana pembelajaran yang baik pula. Sebuah buku yang sarat dengan gagasan-gagasan problematis selalu mencerdaskan dan mencerahkan karena ia membuka pintu-pintu dialog dengan pembacanya, dan juga karena penulisnya tampil jujur, tak berpretensi, menuangkan segala kelebihan dan kekurangannya.

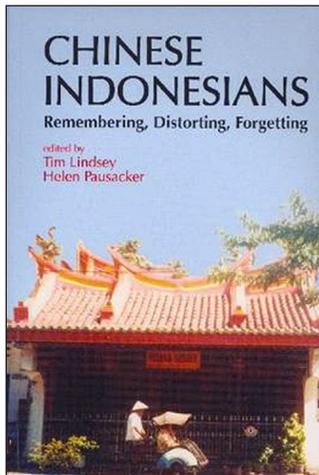
Dialog antara filsafat dan kebudayaan populer perlu dilanjutkan sebagai bagian dari agenda lebih besar untuk mempertemukan yang ideal dengan yang material, sehingga ilmu pengetahuan dapat selalu berkembang. Ada banyak pintu yang telah dibuka menuju kajian-kajian ideologi dalam kebudayaan, khususnya kebudayaan populer, dan ada peluang besar untuk pendalaman-pendalaman dan melanjutkan langkah-langkah awal yang telah dirintis. Setiap pemahaman baru yang lebih mendalam yang diraih dalam bergulat dengan berbagai fenomena pada gilirannya juga akan memperkaya pemahaman atas fenomena-fenomena itu. Seperti kata Irmayanti sendiri dalam salah satu esainya, "Seseorang haruslah terlebih dahulu memahami atau mengerti untuk menafsirkan semua."

CINA PERANAKAN INDONESIA: ANTARA MITOS DAN REALITAS

Tim Lindsay dan Helen Pausacker (ed.). *Chinese Indonesians: Remembering, Distorting, Forgetting*. (Australia: Monash University Press, 2005), xvi + 215 halaman.

Dwi Woro Retno Mastuti

*Program Studi Jawa, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia*



Masih ingat gerakan reformasi 13–15 Mei 1998? Sebagian besar korban pembakaran rumah dan perkosaan dialami oleh etnis Cina Peranakan yang tinggal di Jakarta. Stempel pribumi (penduduk asli) dan nonpribumi (orang asing) ramai dipasang di setiap rumah. Saat itu telah terjadi eksodus besar-besaran etnis Cina Peranakan ke luar negeri. Kejadian ini mengingatkan peristiwa perang Cina di Jawa tahun 1725–1743 yang menimbulkan banyak korban orang Cina (Peter Carey 1984; Willem Remelink 2002). Di Solo, kerusakan yang ditimbulkan pada kelompok etnis Cina sungguh dahsyat. Rumah, toko, mobil dibakar dan dihancurkan. Orang-orang Cina

mengalami pemukulan, penganiayaan, penelanjangan. Tragis. (I. Wibowo 1999).

Studi Cina Peranakan di Indonesia tetap menarik untuk dibahas. Menurut Peter Carey (1984), belum ada pembahasan yang secara utuh menyatukan serpihan masalah seputar Cina di Indonesia. Semua tumpang tindih dan simpang siur. Rumit. Kedatangan etnis Cina dari negeri Tiongkok ke Nusantara yang semula untuk tujuan dagang, akhirnya berdiaspora dan menelusup ke berbagai aspek kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi. Sebutan *Cina-Medan*, *Cina-Singkawang*, *Cina-Jawa*, *Cina-Bali*, *Cina-Bandung*, dan *Cina-Makasar* memperluas dan memperkaya khazanah studi Cina Peranakan.

Charles Coppel adalah salah satu sarjana dari Monash University Australia yang menaruh perhatian terhadap studi Cina Peranakan. Awalnya, ia menekuni studi hukum di berbagai sekolah hukum di Australia. Tahun 1968–1969 ia melewati satu tahun studi Indonesia, ketika Presiden Soeharto sedang gencar “membersihkan” masalah Cina. Kembali ke Australia, Charles A. Coppel mulai menekuni masalah Cina di Indonesia (1969--masa pensiun, 2002). Ia pernah menjabat sebagai Chairman of the Dept. Of Indonesian and Malayan Studies (1976), Associate Dean in Faculty of Arts (1979–1981), dan Deputy Chair of School of Asian Studies (1987). Sekitar 50-an artikel tentang Cina Peranakan di Indonesia telah diterbitkan, baik ditulis sendiri maupun oleh tim. Sebagai orang asing, ia diuntungkan dapat meneliti dan mengamati perkembangan etnis Cina ini di era Soeharto tanpa terlalu “takut” pada peraturan pemerintah nomor 14/1967. Peraturan ini membatasi etnis Tionghoa untuk melakukan aktivitas agama, adat-istiadat, ekonomi. Sejak itu, secara perlahan tetapi pasti telah terjadi “pemasangan” kreativitas etnis Cina di bidang politik, agama (Konghucu), sosial, budaya, kecuali ekonomi. Peraturan ini mengikis identitas kecinaan. Nama-nama Cina berganti menjadi nama-nama Indonesia. Masyarakat Cina beralih memeluk agama Kristen, Katolik, Islam, Buddha. Hubungan politik dengan Republik Rakyat Cina putus. Pertunjukan barongsay dan wayang Potehi hanya pentas sebatas klenteng.

Buku *Chinese Indonesians* ini disusun untuk menghormati Charles Coppel yang pensiun dari Universitas Melbourne pada tahun 2002. *Remembering, Distorting, Forgetting* merupakan refleksi tema yang digunakan Charles dalam tulisannya: "Remembering, Distorting, Forgetting: Sino-Malay Literature in Independent Indonesia". Di sini, Charles memberi perhatian pada "kesalahan atas representasi tentang Cina, dan mencoba menempatkan realitas di balik mitos yang berbasis rasisme dan *xenophobia* (kebencian pada orang asing) di Indonesia".

Jemma Purdey membahas kekerasan atas etnis Cina selama masa reformasi, khususnya para perempuan yang menjadi korban kekerasan di Jakarta tahun 1998. Apakah peristiwa itu dapat dilupakan begitu saja? Tim Lindsay memfokuskan tulisannya pada perubahan sistem hukum pasca-Soeharto dan dampak perubahan tersebut pada Cina Peranakan. Artikel ini mempertanyakan apakah perubahan sistem hukum tersebut merupakan pemutar-balikan fakta dan apakah diskriminasi yang diberlakukan oleh pemerintahan Orde Baru masih "diingat" sebagai peraturan undang-undang.

Leo Suryadinata secara terperinci menyinggung masalah perubahan peraturan Konfusianisme dan Cina-Buddhis pada masa lalu. Ia juga membahas perubahan-perubahan yang terjadi selama reformasi. Agama orang Cina dipolitisir. Perubahan politik juga menjadi perubahan agama/kepercayaan orang Cina. Apakah kemudian orang Cina dapat "melupakan" atau masih "ingat pada" identitas kecinaannya? Arief Budiman membahas perkara perubahan identitas ini dalam bingkai asimilasi atau integrasi orang Cina dari sudut pandang sejarah, baik dalam konteks reformasi ataupun periode pasca-Soeharto.

Etnis Tionghoa di Jawa tidak hanya menjalankan misi dagang dan ekonomi semata. Mereka juga berpolitik, khususnya ketika Belanda memberi konsesi dagang kepada mereka. Dalam melaksanakan politik dagangnya, mereka secara aktif terlibat dalam kegiatan politik secara radikal dalam menjalankan ajaran Konfusianis di periode akhir masa kolonialisme. Gerakan ini lahir di Surabaya. Claudine Salmon membahasnya dalam artikel berjudul "Confucianists and Revolutionaries in Surabaya" (c1880 – c1906).

Pembahasan tentang Cina Peranakan ini tidak hanya mengenai Cina di Jawa. Di Kalimantan Barat, Mary Sommers Heidhues menulis tentang Makam Juang Mandor. Ia adalah salah satu korban keganasan Jepang pada Perang Dunia II. Ia mengingatkan peran etnis Cina di Kalimantan Barat selama masa revolusi kemerdekaan, dan menghubungkannya dengan masa Soeharto dan pasca-Soeharto.

Baru-baru ini peringatan 600 tahun kedatangan Cheng Ho digelar di Semarang. Ia adalah orang Cina yang konon membawa ajaran Islam ke Pulau Jawa. Jean Gelman Taylor membahas peran orang Cina dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Mereka memainkan peranan penting dalam membuat jaringan Islam, baik berupa gagasan maupun pengetahuan keislaman. Ia menegaskan bahwa peran tersebut seringkali "terlupakan" dalam studi Islam di Indonesia.

Buku ini juga membahas masalah “rumah tangga” keluarga Cina yang bersumber dari berita *Star Magazine* (1939–1942), majalah bulanan Cina Peranakan, khususnya “Agony Column” atau *Apa saja Moesti Berboeat?* dengan Nyonya Seng sebagai konselornya. Dalam tulisan ini dibahas berbagai cara atau solusi menyelesaikan masalah rumah tangga. Beberapa masalah yang muncul, seperti perceraian, perkawinan antaretnis, pembatalan perkawinan, kehamilan di luar nikah, pencarian pasangan, peraturan adat, dan pertentangan antara yang “kuno” dan “modern”. Christine Pitt membahasnya dengan membandingkan perubahan-perubahan yang terjadi pada generasi tua Cina dan generasi mudanya.

Wayang Potehi dan wayang kulit Cina-Jawa (*wayang thithi*) merupakan hasil akulturasi budaya Cina dan Jawa. Kedua hal tersebut dibahas oleh Helen Pausacker dengan menyinggung seni pertunjukan wayang lainnya, seperti wayang kancil, dan hari-hari besar Cina (*Goan Tan/Yuandan, Giok Hong Siang Tee Siu Tan/Yuhuang shangdi shoudan, Cap Go Me/Shiwu ye*, dan sebagainya). Artikel ini melampirkan gambar-gambar wayang thithi dari buku *Wayang Cina-Jawa di Yogyakarta* (B. Soelarto dan S. Ilmi Albiladiyah 1980/1981).

Bunga rampai berbagai artikel di buku ini ditulis oleh para sahabat dan murid Charles A. Coppel. Kalau Peter Carey mengeluh bahwa pembahasan studi Cina di Indonesia masih tercerai-berai, buku ini secara sederhana menjawab permasalahan Peter Carey, yaitu peta perjalanan Cina Peranakan di Indonesia dari sudut pandang sejarah, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Ia juga dapat menjadi pijakan bagi mereka yang tertarik untuk menekuni studi Cina Peranakan di Indonesia. Selama 32 tahun, studi Cina Peranakan termarginalkan. Kini saatnya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data dan informasi tentang aktivitas Cina Peranakan Indonesia yang tercerai-berai, tanpa saling curiga, tanpa diskriminasi, tanpa “beban”, dan tanpa rasa takut.